

SKRIPSI

**PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG YANG MELIBATKAN ANAK
SEBAGAI PELAKU MUCIKARI DI POLRESTA BUKITTINGGI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

KANSA NAYLA DWI PUTRI

UNIVERSITAS ANDALAS
2110117010

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

**Dr. A. Irzal Rias, S.H.,M.H
Dr. Nilma Suryani, S.H.,M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 10/PK/IV/III/2025

ABSTRAK

Perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari merupakan bentuk eksploitasi yang semakin mengkhawatirkan, khususnya dalam konteks perdagangan orang sesama jenis. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai hak anak yang semestinya dilindungi. Di Polresta Bukittinggi, ditemukan kasus anak di bawah umur yang menjadi mucikari dalam jaringan perdagangan orang, menunjukkan lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini, peran penyidik sangat penting dalam menegakkan hukum serta memastikan pendekatan yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana peran penyidik dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari? Kedua, apa kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari? Ketiga, apa upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris di Wilayah Polda Riau. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan peran penyidik dalam menangani kasus perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari, tetapi juga menganalisis kendala dan upaya penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini mendapat Kesimpulan penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai pelaku mucikari. Penyidik tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk menjamin perlindungan hak-hak anak selama proses penyidikan. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), melalui pemeriksaan yang ramah anak, upaya diversifikasi, serta perlakuan yang menjamin keselamatan dan pemulihan anak. Namun, penyidik juga menghadapi berbagai kendala, baik secara internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan jumlah penyidik anak, kurangnya pelatihan dan fasilitas yang memadai, serta belum tersedianya ruang rehabilitasi. Sedangkan kendala eksternal mencakup minimnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang, serta stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun demikian, penyidik berupaya maksimal dengan melakukan koordinasi lintas sektor, menggandeng lembaga sosial dan pemerintah daerah, serta terus meningkatkan pendekatan persuasif dan edukatif terhadap anak dan keluarganya.

Kata Kunci: anak, mucikari, penyidik, perdagangan orang